

# DAMPAK KERJASAMA MULTILATERAL TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN

Dedi Budiman Hakim<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

## ABSTRACT

*Multilateral trade agreement under the auspice of the GATT/WTO is expected to change the nation's competitiveness in the global economy. In the context of the agricultural agreement, there are three mayor changing policies to be committed by the WTO members: (a) market access, (b) export subsidies and (c) domestic support. Likewise, ASEAN regional agreement (AFTA) will reduce the relative price of international prices to the domestic prices and the exploitation of the comparative advantage. The questions to be answered is whether such multilateral agreements affect agricultural trade in the region. A recursive-dynamic computable general equilibrium (CGE) and the Global Trade Analysis Project (GTAP) database were used to assess such impacts. Two important scenarios were then considered: APEC and AFTA scenarios. The results indicate that as import tariff levels are completely removed, the demand for imported goods would certainly be increased. This is because domestic consumers (private consumers and industries) would face decreasing domestic prices. However, the size of import changes depends on the initial tariff rates. The higher the initial intra-regional tariffs, and the larger the tariff cuts, the higher the gains from the trade creation. Under the AFTA trade liberalisation, rice output in the ASEAN member countries with the exception of Thailand is projected to shrink. The AFTA tariff reduction would cause an increase in exports in most ASEAN economic sectors. Focusing on the export changes in the agricultural sectors, it is reported that the cereal and processed milk sectors are predicted to have noticeable increases in their exports. However, since trade liberalisation would have adverse effects on the uncompetitive producing sectors, adjustment assistance is highly recommended in order to compensate for any losses; for instance, reduced farm incomes.*

*Keywords : AFTA, APEC, Perdagangan Produk, Pertanian, Tarif Impor, Gita PinGAMS*

## PENDAHULUAN

Tahun 1992 merupakan masa berkembangnya kerjasama regional di beberapa kawasan seperti pasar tunggal Eropa demikian juga di kawasan ASEAN dengan disepakatinya kerjasama ekonomi yang lebih luas dalam wadah *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Berkembangnya kerjasama ekonomi regional dipicu salah satunya lambat kesepakatan yang dicapai oleh GATT (yang kemudian menjadi WTO) khususnya dalam sektor pertanian. Pada tahun 1994 negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi dalam wadah APEC. Dalam pertemuan di Bogor disepakati pula jadwal waktu liberalisasi perdagangan: 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara

berkembang. Dalam kasus AFTA misalnya ada beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia yang khawatir jika AFTA diberlakukan bagi sektor pertanian khususnya produk sensitif seperti beras akan terjadi *social disruption*. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tergantung kepada sektor ini. Selain struktur ekonomi yang berbeda dan juga tingkat efisiensi. Untuk mengetahui bagaimana dampak kerjasama multilateral tersebut terhadap perdagangan produk pertanian, analisis keseimbangan umum digunakan dalam kajian ini.

Akan tetapi pembentukan AFTA sendiri mengundang kritik. Hal ini disebabkan volume perdagangan antar negara ASEAN (*intra trade*) masih kecil yang berkisar antara 18 sampai 22 persen dari total

perdagangan negara-negara ASEAN, kesamaan faktor *endowment*, perbedaan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi dan masih adanya masalah domestik negara-negara ASEAN. Oleh karena itu pemberlakuan AFTA kurang atau berdampak kecil bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Negara-negara ASEAN lebih atau cenderung melakukan perdagangan dengan negara-negara di luar ASEAN seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kontribusi perdagangan dengan negara-negara ini mencapai lebih dari 50 persen dari total perdagangan negara-negara ASEAN.

Untuk melihat bagaimana dampak pemberlakuan AFTA terhadap perdagangan produk pertanian dalam jangka panjang diperlukan kajian yang mendalam serta metodologi yang relevan. Hal ini disebabkan dalam konteks perdagangan antar negara, dampak kebijakan satu negara akan mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di negara bersangkutan juga ekonomi di negara-negara lainnya. Dalam kajian ini model keseimbangan umum yang bersifat rekursiv-dinamik akan digunakan.

## METODOLOGI

Kajian ini menggunakan model *GTAPinGAMS* (Rutherford, 1998) sebagai model dasar. Karena kajian ini ingin menganalisis dampak kerjasama dalam jangka panjang sampai tahun 2015 model tersebut dimodifikasi menjadi rekursiv-dinamik dengan

mengasumsikan beberapa parameter. Dari sekitar 50 produk di database di GTAP versi 4 diaggregasi menjadi 15 produk demikian juga dari sekitar 40 negara atau region diaggregasi menjadi 9 negara atau wilayah (ASEAN, EU, Jepang, Amerika Serikat dan *Rest of World*). EU, Jepang dan Amerika Serikat dipisahkan secara individu karena mereka merupakan partner utama perdagangan negara-negara ASEAN. Untuk baseline skenario digunakan simulasi WTO dan (perkiraan) hasil pertemuan di Doha. Ada tiga kebijakan yang diterapkan : *market access* (penurunan tarif impor), *domestic support* dan *export subsidy*. Untuk skenario kedua dan ketiga, simulasi dilakukan dengan menurunkan import tariff sesuai dengan kesepakatan AFTA yang didokumentasikan dalam *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dan kesepakatan APEC.

## Agregasi Negara dan Komoditi

Dalam GTAP *database* negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Vietnam. Mengingat Vietnam masih merupakan negara dalam transisi, Vietnam tidak dimasukkan ke dalam model. Hal ini dilakukan untuk memegang asumsi penting dalam model yaitu pasar berada pada struktur persaingan sempurna (*perfect competition*). Secara eksplisit negara-negara yang dimasukkan ke dalam model yaitu negara ASEAN di luar Vietnam, negara partner dagang utama yaitu Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa dan Rest of the World (Tabel 1).

Tabel 1 Agregasi Negara (Wilayah)

Negara/Wilayah	Negara atau wilayah yang digabung
<b>Negara –negara ASEAN</b>	
Indonesia	Indonesia
Malaysia	Malaysia
Filipina	Filipina
Singapura	Singapura
Thailand	Thailand
<b>Negara partner dagang utama ASEAN</b>	
Uni Eropa	Inggeris, Jerman, Swedia, Finlandia, Negara-negara EU lainnya EU
Jepang	Jepang
USA	USA
<b>Rest of world</b>	
ROW	Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Vietnam, China, Hong Kong, Taiwan, India, Sri Lanka, Negara Asia Selatan lainnya, Kanada, Mexico, Amerika Tengah dan Karibia, Venezuela, Kolumbia, Negara-negara yang termasuk Andean Pact, Argentina, Brazil, Chili, Uruguay, Negara-negara Amerika Latin lainnya, European Free Trade Area (AFTA), Central European Associates, Negara-negara bekas Uni Soviet, Turki, Negara-negara Timur Tengah lainnya, Moroko, Negara-negara Afrika Utara, Afrika Selatan, Negara-negara di bagian selatan Afrika, Afrika Sub Sahara dan sisa negara-negara lainnya (Rest of world)

Source: GTAP database (version 4)

Demikian juga 50 jenis komoditi yang ada di GTAP database diagregasi ke dalam beberapa jenis komoditi yang relevan dalam kajian ini. Komoditi agregasi baru tersebut yaitu beras, sereal, palawija (*crops*), oil seed, gula, peternakan (*livestock*), produk daging, produk susu, produk pertanian lainnya, minuman dan rokok, produk pertambangan, pakaian dan tekstil, produk manufaktur dan jasa. Dalam kerjasama APEC terdapat produk yang dipercepat proses pengurangan tarifnya yang disebut dengan *the early voluntary sectoral liberalization* (EVSL). Produk tersebut meliputi oil seeds, produk pertambangan dan produk manufaktur.

### Estimasi Tarif Impor Pasca Perputaran Uruguay

Dalam kajian ini baseline model mengacu kepada hasil kesepakatan Uruguay (*Uruguay Round*) dan kemungkinan hasil pertemuan di Doha (*Doha Round*). Perhatian utama adalah bagaimana menentukan tariff impor setelah kesepakatan Uruguay yang akan digunakan dalam pengurangan tarif pada kesepakatan Doha. Data tarif pasca perputaran Uruguay diperoleh dari Francois dan Strutt (1999). Mereka melakukan estimasi berdasarkan informasi tariff pada GTAP database versi 3 dan database GATT/WTO Integrated Database (IDB). Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat tarif untuk komoditi pertanian pada tahun 1995 tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain tarif di *database* tidak perlu diubah. Hal ini disebabkan ketika database dibangun harga-harga internasional cukup tinggi sehingga menyebabkan proteksi yang dicantumkan dalam *database* relatif sangat rendah. Disamping itu ada fenomena "*dirty tariffication*" seperti yang disampaikan oleh Ingco (1996). Dalam konteks ini seringkali negara-negara meningkatkan perbedaan harga domestik dan harga internasional.

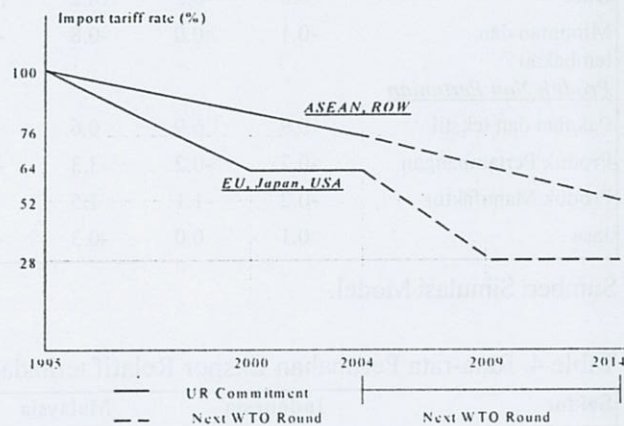
Tabel 2 menggambarkan kemungkinan hasil dari kesepakatan Doha. Data ini digunakan sebagai dasar skenario liberalisasi perdagangan untuk baseline model.

Gambar 1 menjelaskan bagaimana tarif impor dikurangi dalam skenario Pasca dan *Doha Round*.

Tabel 2. Kemungkinan Hasil Perputaran Doha

	Negara berkembang	Negara maju
A. <i>Market Access</i>	24 persen	36 persen
• Pengurangan tarif impor		
B. <i>Domestic Support</i>	13 persen	20 persen
• Pengurangan bantuan produksi		
C. <i>Export subsidies</i>	24 persen	36 persen
• Pengurangan nilai subsidi ekspor		
D. Periode implementasi	2005-2009	2005-2014

Sumber: Diadaptasi dari Ferydhanusetyawan, Pangestu dan Erwidodo (1999).



Gambar 1. Pengurangan Tarif Impor Menurut Kesepakatan Uruguay dan Doha

### Skenario Liberalisasi Perdagangan menurut AFTA dan APEC

Menurut protokol AFTA setiap negara ASEAN diwajibkan menurunkan hambatan perdagangan berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen *Common Effective Preferential Tariffs* (CEPT). Semua produk kecuali yang termasuk produk sensitif pada tahun 2003 akan berkurang tingkat hambatannya yang akan berkisar antara 0 dan 5 persen. Sedangkan bagi produk yang diklasifikasikan *sensitive list* seperti beras pengurangan tarifnya baru berlaku pada tahun 2001 dan diharapkan selesai pada awal tahun 2010. Tingkat tarifnya pun bervariasi. Bagi yang termasuk produk *sensitive list tariff* akhirnya adalah 0-5 persen sedangkan yang termasuk produk *highly sensitive list tariff* akhir adalah 20 persen.

Tabel 3. Rata-rata Perubahan Produksi Relatif terhadap Skenario *Baseline* (%)

Sektor	Indonesia		Malaysia		Filipina		Singapura		Thailand	
	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC
<b><i>Produk Mentah</i></b>										
Beras	-0.1	-0.1	-1.7	-1.5	-1.4	-1.4	-12.7	-11.2	6.2	6.5
Sereal	0.7	0.1	9.6	-22.6	-0.4	-11.7	22.3	16.7	38.7	9.1
Oil seeds	-0.3	-0.5	1.2	3.2	2.6	4.1	-2.4	-2.0	-1.2	-3.1
Ternak	0.1	0.2	1.5	1.1	-1.0	-1.6	-3.8	-3.5	-1.2	1.9
Palawija	0.0	0.0	1.0	0.6	0.0	0.9	2.6	3.1	-1.5	-1.2
<b><i>Produk Olahan</i></b>										
Minyak nabati	-0.3	-0.5	1.6	4.7	-0.9	0.7	-2.8	-2.3	-1.6	-2.1
Olahan Palawija	0.7	0.5	2.7	2.9	-1.1	-0.9	4.8	8.0	0.0	2.5
Daging Olahan	1.2	1.9	-0.7	1.0	-1.7	-2.3	9.7	17.1	-1.0	5.6
Susu Olahan	18.8	18.8	-1.6	-2.4	-1.3	-1.8	40.7	47.0	3.1	3.1
Gula	0.0	-0.2	18.2	17.9	-0.1	-1.2	3.9	6.2	-1.1	-1.3
Minuman dan tembakau	-0.1	0.0	-0.8	-1.0	-4.4	-5.0	2.6	4.2	-0.2	-0.7
<b><i>Produk Non Pertanian</i></b>										
Pakaian dan tekstil	0.9	6.9	0.6	6.3	3.5	16.4	2.0	11.0	1.2	7.5
Produk Pertambangan	-0.7	-0.2	-3.3	-3.7	3.2	3.5	-3.3	-1.4	-0.2	0.5
Produk Manufaktur	-0.2	-1.1	1.5	1.7	5.2	7.0	2.4	0.9	-0.2	-1.6
Jasa	0.1	0.0	-0.3	-0.5	-0.8	-1.4	-1.3	-0.8	-0.1	0.3

Sumber: Simulasi Model.

Table 4. Rata-rata Perubahan Ekspor Relatif terhadap Skenario *Baseline* (%)

Sektor	Indonesia		Malaysia		Filipina		Singapura		Thailand	
	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC
<b><i>Produk Mentah</i></b>										
Beras	-0.4	0.0	5.8	5.6	3.6	3.5	-7.5	-5.8	14.3	14.5
Sereal	157.2	117.2	40.1	2.3	6.6	-3.2	73.9	55.9	186.8	102.6
Oil seeds	4.8	5.7	6.2	7.4	2.8	4.3	-1.0	-0.4	2.4	1.1
Ternak	1.2	1.9	18.2	17.5	-1.2	-2.2	-0.8	-0.3	-1.6	1.2
Palawija	2.1	2.5	2.8	2.1	2.3	7.9	3.2	3.7	-2.4	-0.5
<b><i>Produk Olahan</i></b>										
Minyak nabati	-0.9	-0.9	2.1	6.1	-0.7	1.3	-2.8	-2.0	-0.6	-0.7
Olahan Palawija	4.8	4.3	10.2	11.0	1.3	2.2	7.8	11.9	1.3	5.1
Daging Olahan	6.0	9.6	3.1	6.0	1.0	-0.6	11.5	19.4	-0.2	29.0
Susu Olahan	142.5	141.5	7.7	6.7	44.0	63.6	105.1	119.7	26.6	28.2
Gula	-0.4	-3.1	25.6	25.4	0.9	-5.6	6.0	7.8	-1.3	-1.4
Minuman dan tembakau	1.0	0.2	7.6	-0.6	-1.6	-3.8	3.4	5.1	5.4	4.3
<b><i>Produk Non Pertanian</i></b>										
Pakaian dan tekstil	1.6	9.0	4.0	11.4	5.8	22.3	5.8	22.3	3.4	13.7
Produk Pertambangan	-0.9	0.1	-5.2	-5.4	7.1	8.1	-2.7	0.0	1.0	2.9
Produk Manufaktur	1.1	1.1	2.7	3.3	8.3	13.3	2.8	1.1	1.8	4.0
Jasa	-0.2	-0.1	-1.2	-1.3	-1.1	-2.1	-2.8	-1.8	0.2	1.5

Sumber: Simulasi Model.

susu olahan. Perlu ditekankan di sini kenaikan yang cukup besar bukan berarti secara nominal akan terjadi kenaikan yang cukup besar pula. Hal ini sangat erat kaitannya dengan struktur ekspor dalam total produksi. Karena ekspor diakomodasi dengan model CET (*Constant Elasticity of Transformation*), maka nilai share terhadap total produksi akan berdampak terhadap kenaikan ekspor. Demikian pula secara agregat nilai ekspor susu olahan sangat kecil terhadap total nilai ekspor Indonesia.

Jika memperhatikan dampak skenario APEC, terlihat bahwa lebih progresif penurunan tarif dalam konteks APEC berdampak terhadap kenaikan ekspor produk pertanian. Ini berarti jika negara-negara Asia Pasifik lainnya menurunkan tarif khususnya Jepang dan Amerika Serikat akan meningkatkan permintaan impor bagi Indonesia<sup>2</sup>.

Dampak yang cukup besar dirasakan oleh sektor tekstil. Dengan kata lain sektor ini diuntungkan dengan adanya kesepakatan APEC. Ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki keuntungan komparatif di sektor ini. Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian Ferydhanusetyawan, Pangestu and Erwidodo (1999). Sebuah laporan yang disusun untuk an Initiative of APEC Committee on Trade and Investment mengindikasikan Indonesia dan Thailand telah dan sedang mengembangkan industri tekstil dengan biaya rendah<sup>3</sup>. Sehingga tidak mengherankan liberalisasi perdagangan di sektor ini yang lebih progresif berdampak terhadap peningkatan produksi.

Seperti yang sudah diperkirakan penurunan import tariff dalam konteks AFTA menciptakan peningkatan impor hampir di setiap sektor dan semua negara ASEAN dengan derajat yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan struktur tariff di masing-masing negara. Semakin besar initial import tariffs semakin besar pula peningkatan impornya. Khusus untuk komoditi beras, Malaysia, Filipina dan Singapur diperkirakan akan mengalami peningkatan impor beras yang sebagian besar berasal dari Thailand. Seperti kita ketahui Thailand dan Vietnam merupakan negara utama pengeksport beras. Dengan kesepakatan AFTA pihak Thailand diuntungkan. Database menunjukkan

bahwa tariff impor beras di Malaysia dan Singapura mencapai 130%. Dengan turunnya tarif, harga domestik beras di kedua negara tersebut akan turun cepat. Akibatnya jarak antara kebutuhan domestik dengan produksi domestik akan semakin besar. Jarak ini hanya dapat ditutupi dengan mengimpor beras.

Memperhatikan persentase perubahan ekspor dan impor beras di Malaysia dan Filipina, kedua negara tersebut mengalami kenaikan. Dalam konteks analisis keseimbangan umum (*general equilibrium analysis*) fenomena ini dapat diterangkan sebagai berikut (Blonigen, *et al.* 1997). Dalam kajian ini komoditi domestik dan ekspor dibedakan dengan menggunakan fungsi *Constant Elasticity of Transformation (CET)*. Pertama fenomena ini disebabkan karena efek dari produksi domestik yang berasal dari kontraksi atau ekspansi CET frontier. Kedua mengacu kepada perubahan harga relative berupa pergerakan di sepanjang fungsi CET. Turunnya impor tarif menyebabkan harga domestik turun relatif terhadap harga ekspor. Akibatnya produk domestik akan dialokasikan kepada orientasi ekspor. Agregasi komoditi juga memiliki kontribusi ini. Beras dalam kajian ini merupakan agregasi dari beras dan padi (gabah). Dengan demikian produk beras tidak lagi homogenous lagi. Lebih penting lagi adalah dalam kajian ini fungsi CET dan *Constant Elasticity of Substitution (CES)* pada setiap sektor akan menyebabkan sektor tersebut mengeksport dan juga mengeksport dalam waktu yang bersamaan.

Hasil simulasi kesepakatan APEC memberikan dampak yang tidak terlalu nyata dalam struktur impor di negara ASEAN kecuali untuk kasus impor *sereal* dan *oil seed* di Filipina dan Thailand serta impor ternak di Filipina. Hal ini disebabkan karena negara ASEAN tidak harus menghilangkan tarif impornya karena mereka sudah melakukannya dalam konteks kesepakatan multilateral di bawah payung WTO.

Dampak yang signifikan terlihat pada komoditi tekstil, produk pertambangan dan manufaktur. Baik pada kasus AFTA dan APEC hampir semua negara mengalami peningkatan ekspor dan impor. Peningkatan impor produk manufaktur akan memiliki implikasi yang

<sup>2</sup> Negara APEC dalam kajian ini dibatasi oleh Negara ASEAN, Amerika Serikat dan Jepang. Dampaknya akan berbeda jika negara-negara APEC lainnya dimasukkan kedalam model seperti China, Korea, Australia, New Zealand, Mexico, Kanada dan Rusia.

<sup>3</sup> *Textile Industry in Thailand*, in *The Impact of Liberalisation: Communicating with APEC Communities* (<http://www.arts.monash.edu.au/ausapec/cacthai.htm>).

Tabel 5. Rata-rata Perubahan Import Relatif terhadap Skenario Baseline (%)

Sektor	Indonesia		Malaysia		Filipina		Singapura		Thailand	
	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC	AFTA	APEC
<b><u>Produk Mentah</u></b>										
Beras	0.1	-1.1	19.9	28.4	26.9	35.7	6.3	8.1	-3.5	-4.1
Sereal	0.9	1.3	1.2	2.0	-1.5	17.4	-0.9	-0.6	-7.8	11.8
Oil seeds	1.1	1.5	1.3	2.5	-0.2	0.7	-0.8	1.5	1.0	1.5
Ternak	2.1	1.3	-1.6	-1.3	0.9	5.7	12.5	9.0	2.2	6.6
Palawija	1.3	1.0	1.9	2.6	1.1	2.7	0.1	0.1	5.5	11.4
<b><u>Produk Olahan</u></b>										
Minyak nabati	2.3	3.2	-0.5	-4.1	2.9	2.8	10.3	11.4	6.3	6.0
Olahan Palawija	2.4	3.3	2.4	2.0	5.0	6.3	5.0	4.4	5.0	4.4
Daging Olahan	1.7	0.6	8.8	10.3	9.1	13.2	1.1	1.6	35.8	29.1
Susu Olahan	0.0	-0.7	3.6	23.1	1.4	9.1	-4.3	-5.9	-0.2	2.6
Gula	2.4	2.3	0.4	0.4	-3.0	-1.5	3.4	3.2	1.6	6.9
Minuman dan tembakau	11.4	2.5	9.1	0.0	18.8	29.2	3.1	0.9	-0.7	0.1
<b><u>Produk Non Pertanian</u></b>										
Pakaian dan tekstil	3.0	5.2	7.6	11.5	5.1	15.3	5.1	3.5	3.5	-0.3
Produk Pertambangan	1.6	1.8	3.0	4.2	2.0	3.9	1.9	1.4	-0.2	-1.6
Produk Manufaktur	1.5	3.5	1.7	2.2	2.3	5.4	2.2	1.2	1.4	4.4
Jasa	0.9	0.2	2.6	1.9	0.1	1.5	7.1	4.2	-1.7	-5.1

Sumber : Simulasi Model

cukup luas. Negara pengimpor akan mendapatkan barang modal yang relatif murah dimana barang modal ini digunakan sebagai intermediate faktor pada sebagian besar sektor ekonomi. Karena harganya yang relatif mudah maka permintaan akan barang modal impor akan meningkat. Diharapkan sektor industri yang menggunakan barang modal ini akan meningkatkan kapasitas produksinya.

Dampak liberalisasi perdagangan dalam konteks WTO *round*, AFTA dan APEC terhadap komoditi secara agregat dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk kasus produk pertanian, negara-negara ASEAN relatif tergantung kepada Thailand sebagai pemasok komoditi pertanian di kawasan ini. Misalnya diperkirakan impor komoditi pertanian bukan olahan Malaysia dan Singapura akan mencapai 17 persen dan 14 persen yang berasal dari Thailand. Namun sebaliknya impor komoditi non pertanian sebagian besar dipasok dari Singapura. Malaysia dan Thailand diperkirakan mengimpor produk non pertanian dari Singapura mencapai 23 persen dan 10 persen. Hasil ini

menunjukkan bahwa posisi Singapura sebagai entreport bagi negara-negara di kawasan ASEAN sangat penting. Hasil ini juga paralel dengan kritik yang disampaikan sebelum AFTA ditetapkan. Pengecualian Singapura dalam kesepakatan AFTA hanya akan memiliki dampak yang sangat marginal.

Hasil yang menarik lain adalah mengembangkan kerjasama yang lebih luas seperti APEC tidak berdampak luas terhadap perdagangan antar negara ASEAN khususnya untuk komoditi pertanian. *Share* perdagangan antar negara ASEAN tidak akan berubah banyak. Hasil empiris ini menjawab kekhawatiran berbagai pihak bahwa perluasan kerjasama negara-negara ASEAN akan mengurangi intensitas perdagangan di antara negara ASEAN. Hal ini disebabkan karena sebagian besar negara ASEAN adalah negara yang berbasis pertanian. Disamping itu kecilnya ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap impor produk pertanian dari Jepang dan Amerika Serikat.

Berbeda dengan kasus komoditi pertanian, kerjasama dalam payung APEC memiliki dampak yang cukup besar dalam perdagangan komoditi bukan pertanian. Jika negara ASEAN secara penuh melakukan liberalisasi perdagangan maka akan terjadi pengalihan sumber impor. Negara-negara APEC akan menjadi pemasok utama dalam perdagangan komoditi bukan pertanian. Terdapat dua hal yang menarik dengan adanya kerjasama ekonomi yang lebih luas. Pertama, diperkirakan akan terjadi tekanan terhadap industri domestik karena harga dalam negeri akan semakin terkenan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi kontraksi produksi di beberapa sektor ekonomi khususnya sektor bukan pertanian. Dampak lanjutannya adalah terjadinya penurunan permintaan terhadap faktor produksi khususnya tenaga kerja. Kedua, rendahnya harga barang impor yang juga merupakan barang modal atau intermediate faktor menguntungkan industri yang menggunakan barang impor tersebut. Dengan demikian akan terjadi ekspansi produksi.

#### IMPLIKASI KEBIJAKAN

Jika mengacu kepada kesepakatan AFTA kekhawatiran bahwa penurunan tarif untuk sektor sensitif akan berdampak terhadap social disruption tidak memiliki landasan. Karena impor beras tidak sebesar yang diperkirakan. Akan tetapi karena mayoritas masyarakat pedesaan terkait langsung dengan sektor ini pengurangan produksi beras akan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga petani. Jika sektor pedesaan tidak mampu mengakomodasi pergeseran tenaga kerja maka dapat diperkirakan akan menjadi beban sektor perkotaan. Pemecahan masalah tidak hanya terfokus kepada aspek kebijakan perdagangan saja seperti melakukan negoisasi dengan negara-negara lain khususnya dalam wadah kerjasama multilateral. Dalam jangka panjang upaya perbaikan sistem produksi pertanian di Indonesia sudah harus merupakan program utama, disamping bagaimana pemerintah melakukan perubahan struktural di sektor pertanian. Atau bagaimana pemerintah melakukan *structural adjustments* bagi sektor yang dirugikan akibat kerjasama multilateral tersebut.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah walaupun *magnitude* volume impor beras Indonesia tidak mengalami peningkatan yang cukup tinggi untuk

semua skenario, kehati-hatian menginterpretasikan hasil ini tetap diperlukan. Kajian ini mencoba untuk menghapuskan tarif impor untuk beras pada tahun 2010. Akan tetapi sesuai dengan kesepakatan AFTA produk yang dinilai *highly sensitive* masih diberikan proteksi sebesar 20 %. Ini menunjukkan bahwa ruang untuk melakukan proteksi terhadap industri padi/beras masih cukup luas. Walaupun diakui bahwa kebijakan proteksi merupakan kebijakan yang sifatnya jangka pendek karena hanya akan mengelokasikan sumberdaya ke *sector* yang tidak efisien. Perlu juga melihat karakteristik petani Indonesia yang mungkin sangat berbeda dengan petani-petani padi di negara pengimpor. Kepemilikan lahan yang sangat sempit merupakan kendala yang cukup dominan dalam aplikasi teknologi. Oleh karena itu tidak mungkin membiarkan para petani dalam struktur pasar yang tidak terproteksi. Mobilitas faktor produksi atau perubahan sistem produksi tidak akan terjadi walaupun harga merupakan signal pengambilan keputusan. Artinya bahwa jika harga domestik beras turun tidak berarti bahwa para petani padi akan melakukan konversi penggunaan lahan untuk komoditi lain, yang memberikan *economic return* yang cukup tinggi. Petani memiliki kendala teknis dan sosial sehingga mereka tetap menanam padi. Kelemahan model yang mengasumsikan bahwa faktor produksi memiliki mobilitas sehingga mudah bergerak ke sektor yang memiliki return yang cukup tinggi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dalam prakteknya khususnya di negara-negara berkembang fenomena itu jarang terjadi karena adanya kendala kelembagaan.

Implikasinya adalah perlu peninjauan kembali status komoditi strategis dalam negoisasi kesepakatan multilateral. Diakuinya proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemanfaatan safeguard sendiri tidak cukup untuk melakukan perlindungan terhadap para petani karena selain komoditi itu sendiri tidak dikecualikan, safeguard memerlukan kesepakatan negara lainnya. Artinya negara partner dagang akan meminta kompensasi atas pengajuan safeguard mungkin dalam bentuk proteksi terhadap produk domestiknya.

Manajemen impor mungkin dapat dipertimbangkan. Akan tetapi instrumen ini membutuhkan informasi akurat berapa besar stok beras yang ada di masyarakat khususnya masyarakat pedagang. Fungsi BULOG sebagai satu-satunya pemain utama telah dihilangkan.

Implikasinya adalah suplai beras di dalam negeri akan sukar diprediksi mengingat pelaku impor tidak hanya BULOG itu sendiri. Dikhawatirkan beberapa pihak melakukan impor karena harga beras di pasar internasional yang cenderung turun. Yang terjadi adalah meningkatnya suplai beras di dalam negeri.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kerjasama ekonomi baik dalam payung WTO, AFTA dan APEC memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap struktur perdagangan dan produksi negara anggotanya. *Magnitude* perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur hambatan perdagangan sebelum dan sesudah kesepakatan. Khususnya dalam konteks AFTA rendahnya kenaikan impor beras tidak berarti secara volume jumlahnya tidak signifikan. Mengingat *share* impor beras yang cukup besar dalam struktur perdagangan pangan, indikasi ini perlu diperhatikan secara cermat karena memiliki implikasi kebijakan yang cukup rumit. Dalam konteks APEC pun Indonesia akan mengalami peningkatan impor yang cukup nyata dibandingkan dengan kesepakatan AFTA. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara *net importir* pangan merupakan pasar utama komoditi tersebut. Ada implikasi yang perlu diperhatikan adalah akan terjadinya perubahan struktur permintaan faktor produksi khususnya tenaga kerja dan lahan. Sektor pertanian akan mengalami kontraksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja dan lahan akan berkurang. Dengan kata lain perusahaan komoditi pertanian kurang memberikan balas jasa yang sepadan dengan alokasi faktor produksinya.

Mengingat implikasi yang cukup luas dalam kebijakan pangan (beras) di Indonesia maka evaluasi terhadap kesepakatan yang sifatnya multilateral perlu dipertimbangkan kembali. Perlu klausul khusus yang mengatur perdagangan komoditi strategis. Dengan kata lain komoditi strategis ini harus dikecualikan dalam kesepakatan tersebut. Bagi Indonesia komoditi beras tidak hanya memiliki strategis dari sudut pandang ekonomi juga memiliki nilai sosial. Peninjauan kembali status ini memerlukan negosiasi-negosiasi yang cukup intensif bagaimana meyakinkan negara-negara lainnya

Mengingat kajian ini ada keterbatasan seperti struktur tarif bukan berdasarkan *applied import tariff* maka diperlukan kajian yang lebih mendalam. Asumsi bahwa

struktur pasar dalam kondisi persaingan sempurna dan mudahnya mobilitas faktor produksi juga perlu ditinjau kembali. Kajian yang mencakup jenis rumahtangga mana yang dirugikan atau diuntungkan dari kesepakatan-kesepakatan multilateral juga perlu dilakukan agar dapat diketahui instrumen kebijakan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banse, M. (1997). *Die Analyse der Transformation der Ungarischen Volkswirtschaft. Eine Empirische Allgemeine Gleichgewichtsanalyse unter Besonderer Berücksichtigung des Agrarsektors und der Ernährungsindustrie*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgades des Fachbereichs Agrarwissenschaften der Georg-August Universität Göttingen.
- Beghin, J. (1996). *General Equilibrium Modelling of Trade and the Environment*. Technical papers:116. OECD Development Centre. Paris.
- Blonigen, B.A., J.E. Flynn, and K.A. Reinert. (1997). *Sektor-Focused General Equilibrium Modeling*. In *Applied Methods for Trade Policy Analysis*. A Handbook edited by Francois, J. F., and K. A. Reinert. Cambridge University Press.
- Burniaux, J.M., J. P. Martin, G. Nicoletti and J.O. Martins. (1992). *GREEN. A Multi-sektor, Multi-region Dynamic General Equilibrium Model for Quantifying the Costs of Curbing CO<sub>2</sub> Emissions: A Technical Manual*. Working Paper no. 116. Economic Department. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris.
- De Melo, J., A. Panagriya and D. Rodrik. (1993). *The New Regionalism: a Country Perspective*. In *New Dimensions in Regional Integration*, edited by De Melo, J and A. Panagriya. Cambridge University Press.
- Dervis, K., J. De Melo and S. Robinson. (1982). *General Equilibrium Models for*

*Development Policy*. A World Bank Research Publication. Cambridge University Press. New York.

*Protection: The GTAP 4 Data Base*. Center for Global Trade Analysis. Purdue University.

- Dimaranan, B. (1998). *Capital Stock and Depreciation*. In *Global Trade, Assistance, and Protection: the GTAP 4 Data Base*, edited by R.A. McDouglass, A. Elbehri and T.P. Truong (1998). Center for Global Trade Analysis. Purdue University.
- Feridhanusetyawan, T (1998). *The Impacts of Trade Liberalization on Welfare and Employment in ASEAN*. Working Paper 98.05. ACIAR Indonesia Research Project. Adelaide University. Adelaide.
- Feridhanusetyawan, T., M. Pangestu and Erwidodo. (1999). *The Benefits of Agricultural Liberalization in Asia Pacific*. Working paper 99.02. ACIAR Indonesia Research Project. Adelaide University. Adelaide.
- Francois, J., and A. Strutt. (1999). *Post Uruguay Round Tariff Vectors for GTAP Version 4*. Memo, June.
- Francois, J.F., B.J. McDonald and H. Nordström. (1996). *Liberalization and Capital Accumulation in the GTAP Model*. GTAP Technical Paper No 7. Purdue University. USA.
- Hertel, T.W. (2000). *Potential Gains from Reducing Trade Barriers in Manufacturing, Services and Agriculture*. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 82(4):77-99.
- Hertel, T.W. and W. Martin. (1999). *Would Developing Countries Gain from Inclusion of Manufactures in the WTO Negotiations?* Paper Presented in at the Conference on WTO and The Millennium Round. Geneva, September 20-21, 1999
- Ingco, M.D. (1996). *Tariffication in the Uruguay Round: How Much Liberalization*. *The World Economy* (July 1996): 425-426.
- Mc Dougall, R.A., A. Elbehri., and T.P. Truong. (1998). *Global Trade, Assistance, and*
- Mc Dougall, R.A., B. Dimaranan, and T.W. Hertel. (1998). *Behavioral Parameters*. In *Global Trade, Assistance, and Protection, The GTAP Data Base*, edited by Mc Dougall, R.A., A. Elbehri., and T.P. Truong (1998). Center for Global Trade Analysis. Purdue University.
- OECD. (1995). *Regional Integration and the Multilateral Trading System Synergy and Divergence*. Paris.
- Rae, A.N., S. Chatterjee and S. Shakur. (1999). *The Sectoral Approach to Trade Liberalisation: Should We Try to Do Better ?*. Paper Presented at the Conference on Towards APEC's Second Decade: Challenges, Opportunities and Priorities. 31 May - 2 June, 1999. Auckland, New Zealand.
- Rutherford, T.F. (1998). *GTAPinGAMS: The Dataset and Static Model*. Working Paper, University of Colorado Department of Economics.
- Scollay, R. and J. Gilbert. (1999a). *An APEC Food System: Trade and Welfare Implication by 2005*. APEC Study Centre of New Zealand.
- Springer, K. (1998). *Climate Policy and Trade: Modelling Dynamics in a Multi-regional Framework*. Kiel Institute of World Economics.
- Taylor. (1979). *Macro Models For Developing Countries*. Economics Handbook Series. McGraw-Hill Book Company. New York.
- Young, S. (1993). *East Asia as a Regional Force for Globalism*. In *Regional Integration and the Global Trading System*, edited by Anderson, K and R. Blackhurst (1993). St. Martin's Press. New York.